

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA 2023

BPTU SP PADANG MENGATAS



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
BPTU SAPI POTONG PADANG MENGATAS**

Jl. Padang Mengatas PO BOX 03 Payakumbuh , Sumatera Barat

Telp.0752.759315 Fax : 0752.759369

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2023**

**BPTU SP Padang Mengatas
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023**

Padang Mengatas, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTU SP Padang Mengatas adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTU SP Padang Mengatas. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Lima Puluh Kota, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dani Kusworo, S.Pt, M.Si
NIP. 197902142011011007

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan BPTU Sapi Potong Padang Mengatas Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.195.513.234 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.195.513.234 atau mencapai 55,02 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.173.000.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp17.904.444.032 atau mencapai 47,94 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp37.345.128.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp180.230.351.722 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp13.881.038.507; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp166.349.313.215 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.167.785.893 dan Rp178.062.565.829.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.195.876.562 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp18.420.383.122 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-17.224.506.560, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp727.500.088 dan Rp-16.497.006.472 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16.497.006.472.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp177.850.641.503, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-16.497.006.472 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0 Dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.708.930.798 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp178.062.565.829.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
Pernyataan Tanggung Jawab	lv
Ringkasan Laporan	V
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3 Basis Akuntansi	7
A.4 Dasar Pengukuran	7
A.5 Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1 Pendapatan	17
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	18
B.2 Belanja	20
B.2.1 Belanja Pegawai	21
B.2.2 Belanja Barang	22
B.2.3 Belanja Modal	24
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	27
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	27
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	27
C.3 Belanja dibayar dimuka	27
C.4 Piutang Bukan Pajak	28
C.5 Persediaan	28
C.6 Tanah	29
C.7 Peralatan dan Mesin	30

C.8	Gedung dan Bangunan	31
C.9	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31
C.10	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	32
C.11	Aset Tetap yang Belum Diregister	32
C.12	Aset Lain-lain	32
C.13	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	33
C.14	Utang kepada Pihak Ketiga	33
C.15	Utang yang Belum Ditagihkan	34
C.16	Uang Muka dari KPPN	34
C.17	Ekuitas	34
D.	Penjelasan atas Pos-Pos Operasional	35
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	35
D.2	Beban Pegawai	36
D.3	Beban Persediaan	37
D.4	Beban Barang dan Jasa	38
D.5	Beban Pemeliharaan	40
D.6	Beban Perjalanan Dinas	40
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	41
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	42
D.9	Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	43
D.10	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	43
D.11	Pos Luar Biasa	44
E.	Ekuitas	45
E.1	Ekuitas Awal	45
E.2	Surplus (Defisit) LO	45
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	45
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	45
E.5	Transaksi Antar Entitas	47
E.6	Ekuitas Akhir	52
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	53



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
SAPI POTONG PADANG MENGATAS**

Jl. Raya Payakumbuh – Lintau, KM. 9 Pekan Sabtu, Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota
PO BOX 03. Payakumbuh 26201

Telefon 0752-759315. Faksimile 0752-759369 e-mail:bptu_patas@yahoo.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTU SP Padang Mengatas yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lima Puluh Kota, 30 Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dari Kusworo, S.Pt, M.Si

NIP. 197902142011011007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2023 DAN 2022

U R A I A N	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	2.173.000.000	1.195.513.234	55,02	760.825.003
JUMLAH PENDAPATAN		2.173.000.000	1.195.513.234	55,02	760.825.003
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	4.802.406.000	2.813.515.771	58,59	2.655.355.072
Belanja Barang	B.2.2	30.249.742.000	14.797.543.261	48,92	3.976.919.095
Belanja Modal	B.2.3	2.292.980.000	293.385.000	12,79	673.147.616
JUMLAH BELANJA		37.345.128.000	17.904.444.032	47,94	7.305.421.783

NERACA

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023
DAN 31 DESEMBER 2022**

U R A I A N	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	210.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	21.487.200	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	363.416	-
Persediaan	C.5	13.649.187.891	10.918.016.001
Jumlah Aset Lancar		13.881.038.507	10.918.016.001
ASET TETAP			
Tanah	C.6	142.352.941.000	142.352.941.000
Peralatan dan Mesin	C.7	14.693.469.507	14.214.494.507
Gedung dan Bangunan	C.8	23.367.284.230	23.057.414.230
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	6.979.347.400	6.979.347.400
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(21.353.598.922)	(19.671.571.635)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.11	309.870.000	0
Jumlah Aset Tetap		166.349.313.215	166.932.625.502
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.12	29.358.000	29.358.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(29.358.000)	(29.358.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		180.230.351.722	177.850.641.503
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.14	1.492.980.893	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	464.805.000	-
Uang Muka dari KPPN	C.16	210.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.167.785.893	-
JUMLAH KEWAJIBAN		2.167.785.893	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.17	178.062.565.829	177.850.641.503
JUMLAH EKUTAS		178.062.565.829	177.850.641.503
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		180.230.351.722	177.850.641.503

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.195.876.562	717.374.054
Jumlah Pendapatan		1.195.876.562	717.374.054
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.131.155.677	3.337.415.987
Beban Persediaan	D.3	4.337.734.960	2.570.294.575
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.452.273.019	2.054.059.206
Beban Pemeliharaan	D.5	2.082.071.682	616.454.192
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.134.238.497	1.262.593.126
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	1.941.407.000	2.114.010.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.341.502.287	1.320.627.361
Jumlah Beban		18.420.383.122	13.275.379.447
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(17.224.506.560)	(12.558.005.393)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	(439.500.000)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	1.167.000.088	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		727.500.088	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(16.497.006.472)	(12.558.005.393)
Pos Luar Biasa	D.11		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		(16.497.006.472)	(12.558.005.393)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	177.850.641.503	184.730.889.563
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(16.497.006.472)	(12.558.005.393)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.5	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.4.6	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	16.708.930.798	6.544.596.780
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		211.924.326	(6.013.408.613)
EKUITAS AKHIR	E.6	178.062.565.829	178.717.480.950

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A. 1 Profil dan Kebijakan Teknis

Pada tanggal 24 Mei 2013 Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas Berubah nama menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 56/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas dalam menjalankan kegiatan operasionalnya beralamat di Jl. Padang Mengatas Kec. Luak Kab. Lima Puluh Kota. PO BOX. 03 Payakumbuh 26201. Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mengatas terdiri dari Kepala. Sub Bagian Tata Usaha. Seksi Pelayanan Teknis . Seksi Prasarana dan Sarana Teknis. Seksi Informasi dan Jasa Produksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Visi

Menjadi Pusat Penghasil Bibit Unggul Sapi Potong Nasional.

2. Misi

- a. Meningkatkan Populasi Sapi Potong.
- b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Bibit Sapi Potong.
- c. Menyediakan Bibit Unggul Sapi Potong yang Bersertifikat.
- d. Melakukan Distribusi dan Pemasaran Bibit Unggul Sapi Potong.
- e. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Aparatur dan Pelaku Usaha SapiPotong.
- f. Meningkatkan Pelayanan Teknis. Distribusi dan Pemasaran.
- g. Menerapkan Inovasi Teknologi Sapi Potong.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Bibit Sapi Potong.
- b. Meningkatkan Fungsi Kelembagaan.
- c. Meningkatkan Kemampuan Sumberdaya Manusia Perbibitan.
- d. Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Balai

4. Sasaran

- a. Penyediaan Benih dan Bibit Sapi Potong dalam jumlah yang cukup dan berkualitas secara berkelanjutan.
- b. Optimalisasi Fungsi Kelembagaan Perbibitan.
- c. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia Perbibitan (peternak, petugas dll).
- d. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Balai.

5. Strategi

- a. Pembinaan Perbibitan Ternak di wilayah Sekitar Balai.

- b. Mendorong Usaha-usaha Pembibitan Ternak Rakyat di wilayah sekitar Balai.
 - c. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Perbibitan melalui Pelatihan. Magang. Studi Banding dll.
6. Kebijakan
- a. Pengelolaan dan Peningkatan Mutu dan Jumlah Bibit Sapi potong.
 - b. Penguatan Koordinasi dan Kelembagaan Perbibitan
 - c. Penguatan SDM Perbibitan
 - d. Promosi dan Membangun Citra (brand image) Bibit Ternak.
7. Fungsi
- a. Penyusunan Program. rencana kerja. dan anggaran. pelaksanaan kerja sama. serta penyiapan evaluasi dan
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan. produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul
 - c. Pelaksanaan uji performance dan uji zuriat ternak unggul
 - d. Pelaksanaan recording pembibitan ternak unggul
 - e. Pelaksanaan pelestarian plasma nutfah
 - f. Pelaksanaan pengembangan bibit ternak unggul
 - g. Pemberian bimbingan teknis pemeliharaan. produksi dan pemuliaan bibit ternak unggul
 - h. Pemeliharaan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan pelaksanaandiagnosa penyakit hewan
 - i. Pelaksanaan pengawasan mutu pakan ternak
 - j. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak
 - k. Pemberian informasi, Dokumentasi, penyebaran dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul bersertifikat dan hijauan pakan ternak
 - i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauanpakan ternak unggul
 - m. Pemberian pelayanan teknis pemeliharaan bibit ternak unggul dan produksi bibit ternak unggul
 - n. Pengelolaan prasarana dan sarana teknis
 - o. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPTU HPT

*Pendekatan Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTU SP Padang Mengatas. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari BPTU SP Padang Mengatas. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5 %
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10 %
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50 %
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat	100 %
	tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik

pada tanggal neraca

- * harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
- * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. DIPA BPTU HPT Padang Mengatas TA 2023 dengan No. SP-DIPA- 018.06.2.239434/2023 tanggal 30 November 2022. Kemudian terdapat beberapa kali revisi setelahnya dengan rincian sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp34.937.261.000
- Revisi DIPA 2 pada tanggal 15 Februari 2023 senilai Rp32.917.261.000
- Revisi DIPA 3 pada tanggal 4 April 2023 senilai Rp32.917.261.000
- Revisi DIPA 4 pada tanggal 15 April 2023 senilai Rp32.890.829.000
- Revisi DIPA 5 pada tanggal 9 Mei 2023 senilai Rp32.890.829.000
- Revisi DIPA 6 pada tanggal 30 Mei 2023 senilai Rp37.345.128.000

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja. antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.173.000.000	2.173.000.000
Jumlah Pendapatan	2.173.000.000	2.173.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	4.802.406.000	4.802.406.000
Belanja Barang	28.273.855.000	30.249.742.000
Belanja Modal	1.861.000.000	2.292.980.000
Jumlah Belanja	34.937.261.000	37.345.128.000

Realisasi Pendapatan

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.195.513.234 atau mencapai 55,02 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.173.000.000. Pendapatan BPTU SP Padang Mengatas terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.195.513.234 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.173.000.000	1.195.513.234	55,02
Jumlah	2.173.000.000	1.195.513.234	55,02

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 57,13 % dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.195.513.234	760.825.003	57,13
Jumlah	1.195.513.234	760.825.003	57,13

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.195.513.234 dan Rp760.825.003. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan dari TA 2022

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.195.513.234	760.825.003	57,13
Jumlah	1.195.513.234	760.825.003	57,13

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 57,13 % dibanding tahun sebelumnya karena terjadi peningkatan penjualan ternak pada tahun 2023.

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan PNBP Lainnya Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.193.261.000	669.250.000	78,30
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.252.146	1.760.723	27,91
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	2.300.000	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	88	-	0
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		87.514.280	(100)
Jumlah	1.195.513.234	760.825.003	57,13

- Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan berasal dari penjualan ternak terdiri dari 143 ekor sapi dan rumput yang terdiri dari 2000 stek pakchong dan 2000 stek odot.
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari sewa rumah dinas. Berikut adalah rincian rumah dinas pada BPTU HPT Padang Mengatas:

URAIAN	Jumlah (unit)
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	2
Rumah Negara Golongan I Tipe E Darurat	2
Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	1
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	1
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	3
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	2
Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	10

- Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL berasal dari penerimaan kembali atas pembulatan gaji pada SPM belanja pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan Oktober-Desember 2022 untuk 3 pegawai/ 9 jiwa.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp17.904.444.032 atau 47,94 % dari anggaran belanja sebesar Rp37.345.128.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.802.406.000	2.813.515.771	58,59
Belanja Barang	30.249.742.000	14.797.543.261	48,92
Belanja Modal	2.292.980.000	293.385.000	12,79
Jumlah	37.345.128.000	17.904.444.032	47,94

Dibandingkan dengan TA 2022 Realisasi Belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 145,08 % karena adanya percepatan pelaksanaan kegiatan serta kontrak kerja pada Tahun 2023 sehingga diikuti oleh peningkatan realisasi belanja barangnya. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	2.813.515.771	2.655.355.072	5,96
Belanja Barang	14.797.543.261	3.976.919.095	272,09
Belanja Modal	293.385.000	673.147.616	(56,42)
Jumlah	17.904.444.032	7.305.421.783	145,08

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.813.515.771 dan Rp2.625.218.137. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,17 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang naik pangkat, KGB atau penambahan anggota keluarga TA 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.962.700.480	1.809.212.160	8.48
Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.311	26.937	12.53
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	173.079.848	161.468.146	7.19
Belanja Tunj. Anak PNS	56.539.948	49.632.771	13.92
Belanja Tunj. Struktural PNS	13.320.000	20.160.000	(33.93)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	192.378.000	162.540.000	18.36
Belanja Tunj. PPh PNS	3.410.142	2.624.948	29.91
Belanja Tunj. Beras PNS	144.188.220	131.949.240	9.28
Belanja Uang Makan PNS	212.014.000	234.419.000	(9.56)
Belanja Tunjangan Umum PNS	55.855.000	53.185.000	5.02
Belanja Uang Lembur	0	30.137.000	(100)
Jumlah Belanja kotor	2.813.515.949	2.625.218.202	7.17
Pengembalian Belanja Pegawai	178	65	173.85
Jumlah Belanja	2.813.515.771	2.625.218.137	7.17

Pengembalian Belanja

Rincian Pengembalian belanja Rp178 sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah	Nomor Dokumen	Ket
Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	81	SPM Nomor 059	Kekurangan Gaji Februari 2023 untuk 1 pegawai/ 2 jiwa
Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	24	SPM Nomor 094	Kekurangan Gaji bulan Maret 2023 untuk 3 pegawai/ 9 jiwa
Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	12	SPM Nomor 265	THR Tahun 2023 Untuk 6 Pegawai/Anggota Polri/Prajurit TNI.
Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	60	SPM Nomor 339	Kekurangan Gaji bulan Mei 2023 untuk 7 pegawai/ 28 jiwa
Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	1	SPM Nomor 309	Kekurangan Gaji bulan April 2023 untuk 1 pegawai/ 4 jiwa
Jumlah	178		

Realisasi Belanja Barang

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp14.797.543.261 dan Rp3.976.919.095. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 272,09 % dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya percepatan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 sehingga diikuti oleh peningkatan realisasi belanja barangnya.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Belanja Barang Operasional	895.334.600	541.776.229	65.26
Belanja Barang Non Operasional	2.007.364.575	1.171.708.086	71.32
Belanja Barang Persediaan	6.359.964.250	207.281.550	2,968. 27
Belanja Jasa	228.098.844	230.151.612	(0.89)
Belanja Pemeliharaan	2.063.514.282	586.874.992	251.61
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.048.953.255	1.239.891.626	65.25
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	1.195.910.000	-	0
Jumlah Belanja Kotor	14.799.139.806	3.977.684.095	272.05
Pengembalian Belanja	1.596.545	765.000	208,59 8.69
Jumlah Belanja	14.797.543.261	3.976.919.095	272.09

Belanja Barang Operasional. terdiri dari

- Belanja Keperluan Perkantoran, terdiri dari belanja sehari-hari keperluan kantor, pakaian dinas pegawai dan satpam, honor PPNPN
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja terdiri dari honor KPA, PPSPM, PPK, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, koordinator dan pelaksana SAK, koordinator dan pelaksana SIMAK, PPAPB, pengurus BMN dan staf pengelola keuangan
- Belanja Barang Operasional Lainnya terdiri dari peningkatan daya tahan tubuh

Belanja Barang Non Operasional, terdiri dari

- Belanja bahan terdiri dari Perlengkapan Medis Kesehatan Ternak, foto copy dan penggandaan dokumen, konsumsi bimtek, peralatan kandang, peralatan petugas, peralatan pertanian ringan, peralatan keswan, kit, pengendalian dan pemeriksaan penyakit,
- Belanja barang non operasional lainnya terdiri dari operasional padang penggembalaan, operasional perawatan kebun HPT, pengujian air dan tanah, pengujian bahan baku pakan, pengiriman dan pengujian sampel penyakit hewan, pengadaan semen beku, peralatan IB, eartag, tongkat ukur, ringnose,
- Belanja honor output kegiatan terdiri dari honor Pantia ULP, pejabat pengadaan,

Belanja Barang Persediaan, terdiri dari

- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi terdiri dari obat ternak, ektoparasit, pengadaan bahan, peralatan sanitasi dan desinfektan, kertas HVS, tinta printer
- Belanja Barang Persediaan bahan baku terdiri dari pengadaan bahan pakan/pakan,
- Belanja Barang Persediaan Lainnya terdiri dari pupuk urea, herbisida, molase, bahan silase

Belanja Jasa, terdiri dari

- Belanja Jasa Konsultan terdiri dari belanja jasa perencanaan dan pengawasan pemeliharaan gedung dan bangunan,
- Belanja Jasa Lainnya terdiri dari Audit ISO 37001:2016 dan ISO 9001:2015,
- Belanja Jasa profesi terdiri dari honor narasumber kegiatan,
- Belanja sewa terdiri dari sewa mobil untuk Kegiatan Banpem,
- Belanja Langganan Listrik,
- Belanja Langganan Telepon,
- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya terdiri dari astinet dan indiomex,

Belanja Pemeliharaan, terdiri dari

- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan terdiri dari Pemeliharaan gedung kantor tidak bertingkat, Pemeliharaan Mess, instalasi air, pemeliharaan kandang
- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri dari pemeliharaan hand mower, traktor kecil, chopper, trailer pakan ternak, mesin spraying, traktor, peralatan bengkel, genset, rotaslasher, instalasi listrik, silase baller, double chopper, kendaraan roda 4 double kabin, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6, kendaraan roda 3, kendaraan roda 2, komputer dan printer,

Belanja Perjalanan Dalam Negeri, terdiri dari

- Belanja perjalanan dinas biasa : koordinasi, Studi Banding Petugas Teknis, Pembinaan kelompok pembibitan, Pembinaan UPTD Perbibitan, Perjalanan dalam rangka survey harga konsultasi Pusat, Perjalanan dalam rangka Verifikasi CPCL, Perjalanan dalam rangka Koordinasi/Supervisi/Money, perjalanan dinas biasa, Perjalanan dalam rangka kegiatan strategis Pertanian,
- Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota : narasumber bimtek, workshop penyusunan laporan BMN, Apresiasi BMN, workshop penyusunan laporan keuangan, pertemuan Renja, RKAKL, penyusunan dokumen anggaran.
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota: koordinasi dengan instansi terkait, Dalam rangka konsultasi (Kanwil, KPPN)
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota: koordinasi dengan instansi terkait, perjalanan peserta bimtek.

Rincian Pengembalian belanja Rp1.596.545 sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah	Nomor Dokumen	Ket
Pengembalian belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	216.000	NTPN 1FC7B8JM9RCF N5TB	Pengembalian belanja perjalanan drh. Inhdahwati dkk
Pengembalian belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.330.000	NTPN 4B5002CNR1BE 9VOM	Pengembalian belanja Hendra Syahputra dkk
Pengembalian belanja Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.545	NTPN 4A9D2520AHBC 3AKP	Pengembalian belanja perjadiin drh. Indahwati dkk
Jumlah	1.596.545		

Realisasi Belanja Modal

B.1.1 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp293.385.000 dan Rp673.147.616 Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi,

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 56,42% dibandingkan TA 2022 disebabkan karena lebih kecilnya pagu belanja modal pada Semester I TA 2023.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A.2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.450.000	486.973.000	(71.57)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.935.000	75.974.616	103.93
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	203.731.480	0
Belanja Modal Lainnya	-	-	0
Jumlah Belanja Kotor	293.385.000	673.147.616	(56.42)
Pengembalian Belanja	-	-	0
Jumlah Belanja	293.385.000	673.147.616	(56.42)

Realisasi
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing- masing sebesar Rp138.450.000 dan Rp486.973.000, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 71,57% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, Hal ini disebabkan lebih kecilnya pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.450.000	486.973.000	(71.57)
Jumlah Belanja Kotor	138.450.000	486.973.000	(71.57)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	138.450.000	486.973.000	(71.57)

Penambahan Peralatan dan Mesin TA 2023, diantaranya:

- 5 unit Cow Straching
- 1 unit timbangan ternak

Realisasi
Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp154.935.000 dan Rp75.974.616, Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	154.935.000	75.974.616	100
Jumlah Belanja Kotor	154.935.000	75.974.616	100
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	154.935.000	75.974.616	100

Penambahan Gedung dan Bangunan TA 2023, diantaranya:

- Pembuatan Pos Semen Segar

Realisasi
Belanja Modal
JJJ

B.2.3.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp203.731.480, Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan Realisasi TA 2022, Hal ini disebabkan karena tidak adanya pagu belanja modal untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Belanja Modal Jaringan	-	203.731.480	-
Jumlah Belanja Kotor	-	203.731.480	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	203.731.480	-

Kas di Bendahara
Pengeluaran

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp210.000.000 dan Rp0, Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca, Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Semester I TA 2023 dan Semester II TA 2022

Keterangan	TAHUN2023	TAHUN2022
Uang persediaan RM	210.000.000	0
Uang persediaan PNBPN	-	-
Jumlah	210.000.000	0

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas di bendahara pengeluaran terdiri dari Rp210.000.000 untuk uang persediaan.

Kas di
Bendahara
Penerimaan

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0, Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak,

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan

Semester I TA 2023 dan Semester II TA 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak ada kas pada bendahara pengeluaran

Kas Lainnya dan
Setara Kas

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp21.487.200 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi-investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Pada neraca per 30 Juni 2023 adalah kas lainnya yang merupakan uang perjalanan dinas pada rekening bendahara.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2023 dan Semester II 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Kas Lainnya dan Setara Kas	21.487.200	0
Jumlah	21.487.200	0

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Kas Lainnya merupakan uang LS Bendahara berupa perjalanan dinas yang masih berada dalam rekening bendahara.

Piutang Bukan Pajak

C.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp363.416 dan Rp0.

Rincian sumber Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Piutang Bukan Pajak
Semester I TA 2023 dan Semester II 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Piutang Bukan Pajak	363.416	0
Jumlah	363.416	0

Penjelasan tentang Piutang Bukan Pajak:

Piutang Bukan Pajak merupakan sewa rumah dinas pegawai yang akan dibayarkan melalui potongan SPM Gaji bulan Juli 2023.

Persediaan

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp13.649.187.891 dan Rp10.918.016.001. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2023 dan Semester II 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Barang Konsumsi	2.518.579.700	301.169.985
Suku Cadang	42.084.000	16.500
Pita Cukai. Materai dan Leges	0	0
Bahan Baku	228.654.250	49.799.465
Persediaan Lainnya	10.848.530.941	10.566.598.151
Bahan untuk Pemeliharaan	11.339.000	431.900
Jumlah	13.649.187.891	10.918.016.001

Persediaan tersebut di atas dalam dalam kondisi baik. persediaan terdiri dari:

- Barang konsumsi terdiri dari kertas HVS, tinta cetak, materai, alat bedah, cauter, pinset, gunting, tali nilon, pompa, pakan, tepung tapioka, EM4, saka blok, alat tulis, penjepit kertas, buku tulis, ordener dan map, penggaris, alat tulis kantor lainnya, amplop.
- Suku cadang terdiri dari alat kedokteran lainnya seperti kapas, glove karet, plastik silase, isi pisau cater.
- Bahan baku terdiri dari bahan kimia padat (pupuk Urea, desinfektan), bahan kimia cair (round up), kawat
- Persediaan lainnya terdiri dari obat-obatan, anti parasit dan sapi yang berasal dari ternak turunan (Simmental, Limousin dan Pesisir)
- Bahan untuk pemeliharaan terdiri dari drum, soda api, kuas, box ATK.

Tanah

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp142.352.941.000 dan Rp142.352.941.000, Nilai Tanah tersebut Tidak ada mutasi tambah dan kurang tanah periode Semester I Tahun 2023. Mutasi nilai Tanah tersebut dapatdijelaskan sebagai

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	142.352.941.000
Mutasi tambah :	
	-
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 30 Juni 2023	142.352.941.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah
Semester I TA 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.800.000 m2	BPTU HPT Padang Mengatas, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota	142.352.941.000
Jumlah			142.352.941.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak ada tanah yang dikuasai pihak ketiga periode Semester I Tahun 2023

Peralatan dan Mesin

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp14.693.469.507 dan Rp14.214.494.507, Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	14.214.494.507
Mutasi tambah:	
Pembelian Peralatan dan Mesin	138.450.000
Transfer Masuk	340.525.000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2023	14.693.469.507
Akumulasi Penyusutan s.d, 30 Juni 2023	(11.502.345.576)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	3.191.123.931

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin TA 2023:

- Pembelian 5 unit Cow Straching
- Pembelian 1 unit timbangan ternak
- Transfer Masuk 1 unit kendaraan roda 4

Gedung dan Bangunan

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.367.284.230 dan Rp23.057.414.230, Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	23.057.414.230
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung dan Bangunan	309.870.000
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2023	23.367.284.230
Akumulasi Penyusutan s,d, 30 Juni 2023	(5.419.247.702)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	17.948.036.528

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan TA 2023:

- Pembuatan Pos Semen Segar
- Pembuatan Pos Recording, telah dilakukan BAST pekerjaan pembuatan pos recording pada bulan April 2023 namun pertanggung jawaban keuangan dilakukan pada bulan Juli 2023 karena menunggu target PNPB terpenuhi.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp6.979.347.400 dan Rp6.979.347.400. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	6.979.347.400
Mutasi tambah:	
Mutasi Kurang:	
Saldo per	6.979.347.400
Akumulasi Penyusutan s.d.	(4.432.005.644)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	2.547.341.756

Akumulasi

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp18.415.006.710 dan Rp18.415.006.710. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	14.693.469.507	(11.502.345.576)	3.191.123.931
2	Gedung dan Bangunan	23.367.284.230	(5.419.247.702)	17.948.036.528
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.979.347.400	(4.432.005.644)	2.547.341.756
Akumulasi Penyusutan		45.040.101.137	(21.353.598.922)	23.686.502.215

Aset Tetap Blm Register

C.11 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp309.870.000 dan Rp0. Aset Tetap yang Belum Diregister adalah Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Pos IB yang memiliki BAST pekerjaan tgl 5 Mei 2023 namun belum dilakukan pertanggungjawaban keuangan karena masih menunggu kecukupan realisasi PNPB dan Pekerjaan Pembuatan Pos Penandaan Ternak yang memiliki BAST pekerjaan tgl 2 Juni 2023 namun pertanggungjawaban keuangan dilakukan pada bulan Juli 2023.

Aset Lain-lain

C.12 Aset Lain-lain

Saldo aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp29.358.000 dan Rp29.358.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	29.358.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2023	29.358.000
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2023	(29.358.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	0

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya*

C. 13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp29.358.000 dan Rp29.358.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi AsetLainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Lain-lain	29.358.000	(29.358.000)	-
Total	29.358.000	(29.358.000)	-

*Utang kepada
Pihak Ketiga*

C. 14 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.492.980.893 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Utang kepada
Pihak Ketiga*

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Utang kepada Pihak Ketiga	1.492.980.893	0
Total	1.492.980.893	0

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan pekerjaan yang masih dalam proses pembayaran.

Utang Yang Belum Ditagihkan

C. 15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp464.805.000 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Utang yang belum ditagihkan TA 2023 adalah utang atas pekerjaan Pembuatan Pos Recording yang dilakukan pembayarannya belum dilakukan s.d akhir Juni 2023. Adapun rincian Utang yang belum ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang yang belum ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Utang yang belum ditagihkan	464.805.000	0
Total	464.805.000	0

Uang Muka dari KPPN

C. 16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing- masing sebesar Rp210.000.000 dan Rp10 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagaiberikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	210.000.000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	210.000.000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Uang muka dari KPPN merupakan uang persediaan senilai Rp210.000.000.00 yang terdiri dari Rp210.000.000 Rupiah Murni.

Ekuitas

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp178.062.565.829 dan Rp177.850.641.503. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.195.876.562 dan Rp717.374.054. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan sebesar 66,70 % dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh lebih banyaknya penjualan ternak pada TA 2023. Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan	1.193.261.000	669.250.000	78.30
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.615.562	2.131.304	22.72
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	-	2.300.000	(100.00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	43.692.750	(100.00)
Jumlah	1.195.876.562	717.374.054	66.70

- Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan berasal dari penjualan ternak dan rumput.
- Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari sewa rumah dinas.

Berikut ini disajikan perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).

Tabel Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LRA dan LO per 30 Juni 2023

URAIAN	LO	LRA	Selisih
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	1.193.261.000	1.193.261.000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Dan Bangunan	2.615.562	2.252.146	363.416
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	88	88
Jumlah	1.195.876.562	1.195.513.234	363.504

- Selisih Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Dan Bangunan Rp363.416 merupakan sewa rumah dinas pada potongan SPM Gaji Juli 2023, dimana SPMnya tertanggal pada bulan Juni namun SP2D nya tertanggal dibulan Juli 2023.
- Selisih Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL berasal dari penerimaan kembali atas pembulatan gaji pada SPM belanja pegawai berupa Kekurangan Gaji bulan Oktober-Desember 2022 untuk 3 pegawai/ 9 jiwa.

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.131.155.677 dan Rp3.337.415.987.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,18 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun dan mutasi Tahun 2023. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.202.630.080	2.324.095.040	(5.23)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(178)	-	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	33.564	34.705	(3.29)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	194.158.638	207.459.086	(6.41)
Beban Tunj. Anak PNS	63.418.038	63.833.233	(0.65)
Beban Tunj. Struktural PNS	14.580.000	25.920.000	(43.75)
Beban Tunj. Fungsional PNS	216.426.000	208.980.000	3.56
Beban Tunj. PPh PNS	3.479.095	4.737.703	(26.57)
Beban Tunj. Beras PNS	161.641.440	169.535.220	(4.66)
Beban Uang Makan PNS	212.014.000	234.419.000	(9.56)
Beban Tunjangan Umum PNS	62.775.000	68.265.000	(8.04)
Beban Uang Lembur	-	30.137.000	(100)
Jumlah	3.131.155.677	3.337.415.987	(6.18)

*Beban
Persediaan*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.337.734.960 dan Rp2.570.294.575

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 68,76 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Beban persediaan terdiri dari:

- Beban persediaan konsumsi terdiri dari kertas HVS, tinta cetak, materai, alat bedah, cauter, pinset, gunting, tali nilon, pompa, pakan, tepung tapioka, EM4, saka blok, alat tulis, penjepit kertas, buku tulis, ordener dan map, penggaris, alat tulis kantor lainnya, amplop.
- Beban Persediaan Bahan baku terdiri dari bahan kimia padat (pupuk Urea, desinfektan), bahan kimia cair (round up), kawat
- Beban Persediaan lainnya terdiri dari obat-obatan, anti parasit dan sapi yang berasal dari ternak turunan (Simmental, Limousin dan Pesisir)

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Beban Persediaan konsumsi	3.597.295.285	2.491.003.175	44.41
Beban Persediaan bahan baku	103.848.465	40.700.000	155.16
Beban persediaan lainnya	636.591.210	38.591.400	1,549.57
Jumlah Beban Persediaan	4.337.734.960	2.570.294.575	68.76

Beban Barang
Dan Jasa

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.452.273.019 dan Rp2.054.059.206.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	795.000.630	501.387.969	58.56
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.190.470	4.881.000	(34.63)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	78.990.000	74.200.000	6.46
Beban Barang Operasional Lainnya	93.153.500	27.592.500	237.60
Beban Bahan	482.497.450	371.827.666	29.76
Beban Honor Output Kegiatan	3.400.000	5.900.000	(42.37)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.767.942.125	829.653.420	113.09
Beban Langganan Listrik	30.515.980	31.010.406	(1.59)
Beban Langganan Telepon	3.580.309	4.330.192	(17.32)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	24.107.555	48.144.553	(49.93)
Beban Jasa Konsultan	95.300.000	57.824.500	64.81
Beban Sewa	12.195.000	13.000.000	(6.19)

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023

Beban Jasa Profesi	62.400.000	30.100.000	107.31
Beban Jasa Lainnya	-	54.207.000	(100.00)
Jumlah	3.452.273.019	2.054.059.206	68.07

- Beban keperluan perkantoran terdiri dari belanja sehari-hari keperluan kantor, pakaian dinas pegawai dan satpam.
- Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- Beban honor operasional satuan kerja terdiri dari honor KPA, PPSPM, PPK, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, koordinator dan pelaksana SAK, koordinator dan pelaksana SIMAK, PPAPB, pengurus BMN dan staf pengelola keuangan.
- Beban bahan operasional lainnya terdiri dari peningkatan daya tahan tubuh.
- Beban bahan terdiri dari dari Perlengkapan Medis Kesehatan Ternak, foto copy dan penggandaan dokumen, konsumsi bimtek, peralatan kandang, peralatan petugas, peralatan pertanian ringan, peralatan keswan, kit, pengendalian dan pemeriksaan penyakit.
- Beban honor output kegiatan terdiri dari honor pejabat pengadaan.
- Beban barang non operasional lainnya terdiri dari operasional padang penggembalaan, operasional perawatan kebun HPT, pengujian air dan tanah, pengujian bahan baku pakan, Pengiriman dan pengujian sampel penyakit hewan.
- Beban Langganan Listrik.
- Beban Langganan Telepon.
- Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya terdiri dari astinet dan indihome.
- Beban Jasa Profesi terdiri dari honor narasumber kegiatan.

Beban
Pemeliharaan

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.082.071.682 dan Rp616.379.192.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 237,79 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.429.901.100	186.759.500	665.64
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	633.613.182	429.494.192	47.53
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	431.900	-	0
Beban Persediaan suku cadang	18.125.500	125.500	14,342.63
Jumlah	2.082.071.682	616.379.192	237.79

- Beban pemeliharaan gedung dan bangunan terdiri dari Pemeliharaan gedung kantor tidak bertingkat, Pemeliharaan Mess, instalasi air.
- Beban pemeliharaan peralatan dan mesin terdiri dari pemeliharaan hand mawer, traktor kecil, chopper, trailer pakan ternak, mesin spraying, traktor, peralatan bengkel, genset, rotaslasher, instalasi listrik, silase baller, double chopper, kendaraan roda 4 double kabin, kendaraan roda 4, kendaraan roda 6, kendaraan roda 3, kendaraan roda 2, komputer dan printer.
- Beban persediaan suku cadang
- Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan

Beban Perjalan

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.134.238.497 dan Rp1.262.593.126.

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 69,04 persen dibandingkan Tahun 2022. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Beban Perjalanan Biasa	1.895.582.048	957.368.663	98
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(1.596.545)	-	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000	2.900.000	(43.10)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	188.995.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	238.602.994	113.329.463	110.54
Jumlah	2.134.238.497	1.262.593.126	69.04

- Beban perjalanan dinas biasa : koordinasi, Studi Banding Petugas Teknis, Pembinaan kelompok pembibitan, Pembinaan UPTD Perbibitan, Perjalanan dalam rangka survey harga konsultasi Pusat, Perjalanan dalam rangka Verifikasi CPCL, Perjalanan dalam rangka Koordinasi/Supervisi/Monev, perjalanan dinas biasa, Perjalanan dalam rangka kegiatan strategis Pertanian,
- Beban perjalanan dinas paket meeting luar kota : narasumber bimtek, workshop penyusunan laporan BMN, Apresiasi BMN, workshop penyusunan laporan keuangan, pertemuan Renja, RKAKL, penyusunan dokumen anggaran.
- Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota: koordinasi dengan instansi terkait, Dalam rangka konsultasi (Kanwil, KPPN)

*Beban Barang
Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.941.407.000 dan Rp2.114.010.000.

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 8,16 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh adanya distribusi Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat TA 2021 pada awal TA 2022. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Semester I TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.941.407.000	2.113.010.000	(8.12)
Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	1.000.000	(100)
Jumlah	1.941.407.000	2.114.010.000	(8.16)

Terdapat perbedaan/selisih dengan realisasi keuangan dikarenakan adanya SP2D pada bulan Juli 2023 namun BAST pada bulan Juni 2023 untuk Pengadaan Ternak Kambing/Domba untuk Kab. Sawahlunto dan Pengadaan Ternak Sapi Potong untuk Kab. Solok Selatan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D. 8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.341.502.287 dan Rp1.320.627.361.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	524.337.173	514.161.188	1.98
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	462.348.334	449.503.363	2.86
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	275.290.987	275.919.678	(0.23)
Beban Penyusutan Irigasi	67.508.309	69.067.167	(2.26)
Beban Penyusutan Jaringan	12.017.484	11.975.965	0.35
Jumah Penyusutan	1.341.502.287	1.320.627.361	1.58
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.341.502.287	1.320.627.361	1.58

Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.9 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp439.500.000 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Beban Pelepasan Aset	439.500.000	-	-
Jumlah	439.500.000	-	-

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.167.000.088 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	88	-	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.167.000.000	-	-
Jumlah	1.167.000.088	-	-

- Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu berasal dari pengembalian belanja pembulan gaji pegawai tahun yang lalu.
- Pendapatan perolehan aset lainnya berasal dari ternak turunan.

*Pos Luar
Biasa*

D.11 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022	%
0	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp177.850.641.503 dan Rp184.730.889.563

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp-16.497.006.472 dan Rp-12.558.005.393. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan nonoperasional. dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Revaluasi tersebut berasal dari : tidak ada selisih

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2023

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai..

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang. Tidak ada rincian koreksi lain-lain pada tahun 2023. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
	-
-	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas*

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.708.930.798 dan Rp6.544.596.780. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL). antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.904.444.032
Diterima dari Entitas Lain	(1.195.513.234)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Jumlah	16.708.930.798

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022. DKEL sebesar Rp 17.904.444.032 sedangkan DDEL sebesar Rp-1.195.513.234.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2023

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Ekuitas Akhir

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp178.062.565.829 dan Rp178.717.480.950.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Pengelola Keuangan

Daftar pengelola keuangan pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijuan Pakan Ternak Padang Mengatas per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Nama/ NIP	Jabatan
Dani Kusworo. S.Pt. M.Si NIP.197902142011011007	Kuasa Pengguna Anggaran
Drh. Indahwati. MP NIP.196503011998032001	Pejabat Penandatanganan SPM
Dika Muharam. S.Pt NIP.198609062014031003 & Yudhi Prima J. SH MH NIP.198409022006041001	PPK
Yuni Alfika, A.Md NIP.198810242011012008	Bendahara Pengeluaran
Adek Suryanto. A.Md NIP.197601081997031001	Bendahara Penerimaan
Fikra Salsabila Irwan, A.Md NIP. 199604262020122006	Petugas SIMAK BMN
Vinni Vindriani NIP.199404272014032001	Petugas GLP